GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas **Tgl/Bln/Thn : 9/12/2004**

Subyek : **Hari : Kamis**

Kata Kunci : **Halaman : 10**

Tak Gentar Hadapi "Psy-War", Pemerintah Siap Menangkan Buyat

Jakarta, Kompas - Pemerintah melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menyatakan tekadnya untuk memenangkan kasus pencemaran kawasan Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Kini, bukti-bukti penguat menuju proses persidangan terus dilengkapi. Kepada wartawan usai menemui perwakilan warga Buyat di ruang kerja Menteri LH, Rachmat Witoelar menegaskan sikap kementeriannya yang didukung penuh oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami harus memenangkan kasus ini," kata dia, Rabu (8/12). Pagi harinya, Rachmat telah menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan. Saat itu ia menegaskan, meskipun ada kontroversi di pers dan ada psy-war dari perusahaan yang akan digugat yaitu PT Newmont Minahasa Raya (NMR), pemerintah tetap tidak gentar.

Psy-war itu misalnya berupa iklan yang banyak ditayangkan di media elektronik tentang indah dan bersihnya kawasan Teluk Buyat maupun upaya pihak perusahaan untuk bertemu dengan Menteri LH. Tekad pemerintah bahkan telah disampaikan langsung kepada Presiden Direktur PT NMR, Richard Ness, maupun CEO Newmont Mining di pusatnya di Denver, Colorado, AS, Wayne Murdy.

Menurut Rachmat, pihak Newmont sempat menyatakan keinginannya untuk berdamai dan tidak membawa kasus tersebut ke pengadilan. Namun, hal itu ditolak karena pemerintah tidak mau lingkungan terus menjadi korban. Manajer Hubungan Masyarakat Newmont Rubi Purnomo yang dihubungi terpisah mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya bukan meminta berdamai. Namun, mencari penyelesaian terbaik. "Kalau bisa diselesaikan di luar hukum, kan bisa lebih baik," kata dia. Rubi tetap berkeyakinan bahwa tidak ada pencemaran di Teluk Buyat. Mengenai persiapan di bidang hukum, semua sudah ditangani pengacara Newmont.

Pemberkasan

Berkas gugatan pemerintah kepada PT Newmont dan lima pejabatnya telah hampir selesai dipersiapkan. Diharapkan awal Januari 2005 sidang pertama dapat digelar di pengadilan. Asisten Deputi Penegakan Hukum Lingkungan KLH Sudarsono mengatakan, persiapan pemberkasan terus dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti ilmiah, termasuk menyiapkan delapan saksi ahli. Jaksa peneliti kasus juga telah menjelaskan posisi kasus di Kejaksaan Tinggi, yang masih akan berlanjut pekan ini. "Kami sedang membuat dakwaan pidana dan perdata," kata dia. Bila seluruh isi berkas diterima tanpa perbaikan, diperkirakan persidangan bisa dimulai pada bulan Januari 2005 dan selesai paling cepat tiga bulan kemudian. Untuk memantaunya, KLH menyatakan akan membuat pos pemantauan di Sulawesi Utara, tempat persidangan digelar. KLH bertekad mengawal seluruh proses persidangan hingga selesai. Sekalipun harus berhadapan dengan departemen lain.

Pesan presiden

Rachmat mengemukakan, dalam pertemuan sekitar satu jam itu, Presiden Yudhoyono berpesan agar proses hukum terhadap PT Newmont perlu dilakukan untuk menegakkan undang-undang yang dibuat pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Undang-undang lingkungan hidup itu tidak boleh dilanggar oleh siapa pun termasuk oleh para investor. "Yang penting menurut Presiden adalah perlunya sikap obyektif terhadap perkembangan yang ada. Tidak boleh serta merta menghukum atau mencabut izin. Melalui proses hukum di pengadilan dapat diketahui yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum atau tidak," tambahnya.

Menurut Rachmat, Presiden mengemukakan bahwa dengan proses hukum ini pesan yang ingin disampaikan kepada para investor adalah jika mereka mengikuti semua aturan, mereka akan terlindungi. Indonesia ingin masuk dalam arus besar negara yang industrinya ramah lingkungan. Terkait dengan ketegasan pemerintah untuk menegakkan undang-undang yang melindungi lingkungan hidup dari proses industrialisasi yang tengah terjadi, pekan ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup akan menerbitkan sertifikasi 261 perusahaan dengan klasifikasi baik dalam mengelola lingkungan, biasa, kurang baik, dan buruk. Dari data tersebut, 43 perusahaan masuk dalam kategori buruk.

Mendesak pemerintah

Warga Buyat juga mendatangi Komnas Perempuan pada pagi harinya. Komnas Perempuan yang diwakili Ketua Subkomisi Pemantauan Nunuk Prasetyo Murniati menyatakan, penanganan gangguan kesehatan warga Buyat tidak bisa ditunda lagi. "Hingga kini warga Buyat belum memperoleh layanan kesehatan secara intensif, kontinu, dan terjangkau," kata Nunuk. Komnas Perempuan menerima laporan dari warga Buyat pada 2 Desember lalu bahwa sebagian warga merasa dipersulit mengakses layanan kesehatan karena kasus ini dianggap terlalu politis. Para dokter lokal enggan merawat mereka. "Pemulihan kesehatan warga Buyat, termasuk kaum perempuan yang terganggu kesehatan reproduksinya merupakan tanggung jawab negara atas hak asasi warga. Pemulihan ini tidak bisa menunggu selesainya proses hukum," papar Nunuk.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP